Jurnal Sosial Humaniora
(JSH)
Beranda Jurnal : https://ejournal.suryabuanaconsulting.com/
ISSN: 3063-2722 DOI:

# Politik Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial : Ketergantungan Masyarakat Batu pada Program Kebijakan Bantuan Sosial

**Diki Wahyudi[1], Iin Sulis Setyowati[2], Eko Rizqi Purwo Widodo[3], Dewinnisa Thiflingga Ismanto[4], Azka Rizky Nugraha[5]**
Program Studi Kesejahteraan Sosioal, Universitas Muhammadiyah Malang
*Corresponding author: dikiwahyudi@umm.ac.id

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana program bantuan sosial dilaksanakan, mengidentifikasi penyebab ketergantungan penerima dan menjelaskan inisiatif pemerintah untuk mendorong keluarga penerima manfaat agar menjadi mandiri. Sebagai alat penting dalam kebijakan kesejahteraan sosial, program bantuan sosial melindungi kelompok rentan dan membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun, masih terdapat sejumlah masalah dalam implementasi bantuan sosial, terutama terkait akurasi data penerima manfaat, persepsi publik terhadap program dan kecenderungan sebagian peserta untuk terus menerima bantuan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Pekerja sosial yang secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program bantuan sosial serta perwakilan dari Dinas Sosial menjadi narasumber penelitian. Untuk memahami dinamika pelaksanaan program dan perilaku penerima bantuan, data dianalisis melalui proses transkripsi, reduksi data, kategorisasi tema dan interpretasi. Temuan menunjukkan bahwa bantuan sosial umumnya dilaksanakan melalui metode distribusi yang lebih langsung dan terorganisir kepada pengguna, yang telah mengurangi kemungkinan penyalahgunaan. Namun, hambatan utama yang memengaruhi ketepatan penargetan program tetaplah masalah kualitas data penerima manfaat dan pembaruan data. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa sifat rutin desain program, opini masyarakat, budaya menerima bantuan dan kondisi ekonomi keluarga saling berinteraksi untuk memengaruhi ketergantungan penerima manfaat terhadap bantuan sosial. Namun, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi ketergantungan, termasuk langkah-langkah pemberdayaan ekonomi, pertemuan pengembangan kapasitas keluarga dan program lulusan. Kualitas metode pengumpulan data, prosedur verifikasi, dukungan sosial serta pengintegrasian inisiatif pemberdayaan yang berfokus pada kemandirian penerima, semuanya memengaruhi efektivitas bantuan sosial menurut temuan studi ini.

**Keyword:** Politik kesejahteraan, perlindungan sosial, bantuan sosial, ketergantungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat

## Pendahuluan

Salah satu alat kebijakan negara untuk menjaga stabilitas kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok rentan dan rumah tangga berpendapatan rendah adalah program bantuan sosial (Hermawati et al., 2024). Bantuan sosial ditempatkan dalam kerangka negara kesejahteraan sebagai inisiatif perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar individu dan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memerangi kemiskinan. Bantuan sosial sangat penting karena kemiskinan bukan hanya akibat pendapatan rendah, hal ini juga terkait dengan akses yang tidak memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan berkualitas dan sumber daya keuangan yang cukup (Syahwanes et al., 2025).

Silakan kutip artikel ini sebagai: Wahyudi, Sulistyowati, Widodo, Ismanto, dan Nugraha (2026). Politik Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial : Ketergantungan Masyarakat Batu pada Program Kebijakan Bantuan Sosial. *Jurnal Sosial Humaniora* (JSH), 3(2), 95-104.

Bantuan sosial dimaksudkan sebagai jaring pengaman sosial yang transformatif dan protektif (Siahaan et al., 2025). Di satu sisi dukungan sosial membantu masyarakat miskin tetap tangguh di hadapan kesulitan finansial. Namun, diharapkan program ini berfungsi sebagai batu loncatan bagi penerima untuk meningkatkan kemampuan hidup secara lebih mandiri (Wuryaningsih, 2024). Oleh karena itu, bantuan sosial idealnya tidak hanya sekadar memberikan kesejahteraan akan tetapi juga harus digunakan sebagai alat pemberdayaan yang dapat membantu penerima secara bertahap keluar dari situasi rentan (Prafianti & Prananta Moeis, 2025). Namun pada kenyataannya, program bantuan sosial sering menghadapi kesulitan yang melampaui sekadar distribusi bantuan (Syamsulhakim & Khadijah, 2021). Kesulitan ini mencakup faktor sosial, budaya dan perilaku dari populasi penerima selain faktor administratif, teknologi dan birokrasi. Kecenderungan sebagian penerima untuk memandang bantuan sosial sebagai sumber pendapatan jangka panjang bukan sebagai dorongan jangka pendek untuk memperbaiki kondisi keuangan keluarga merupakan masalah yang sangat signifikan (Syahputra & Sukmana, 2024). Situasi ini menunjukkan bahwa sejauh mana program dapat mendorong orientasi kemandirian di kalangan pengguna menentukan efisiensi bantuan sosial selain keberhasilan distribusinya (Nasripani, 2025).

Dalam pembahasan kebijakan kesejahteraan, fenomena ketergantungan pada bantuan sosial telah muncul sebagai perhatian krusial. Ketergantungan harus diinterpretasikan sebagai hasil interaksi antara kondisi ekonomi rumah tangga, pengalaman sosial penerima, persepsi masyarakat secara kolektif terhadap bantuan dan desain kebijakan yang diterapkan (Fentiani et al., n.d.). Hal ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kurangnya motivasi individu. Karena bantuan sering diberikan tanpa insentif struktural yang cukup untuk mendorong kemandirian ekonomi, penerima sering kali tetap berada dalam posisi pasif. Namun, bantuan sosial tetap esensial untuk mempertahankan mata pencaharian kelompok-kelompok yang kurang beruntung di masyarakat yang terus hidup dalam situasi yang tidak aman (Zainab et al., 2023).

Ketepatan data mengenai penerima bantuan sosial menjadi hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan sosial, selain masalah ketergantungan (Sylvia et al., 2025). Penerima yang secara ekonomi sudah tidak memenuhi syarat namun tetap tercatat sebagai penerima serta pengabaian terhadap orang yang sebenarnya lebih membutuhkan, dapat terjadi akibat ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi nyata di masyarakat (Ruben, 2025). Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sosial tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan besarnya anggaran atau jumlah penerima, kualitas sistem pengumpulan data, prosedur verifikasi dan kemampuan lembaga pelaksana untuk memperbarui data secara berkala semuanya memiliki dampak yang besar (Taufik et al., 2025).

Hubungan antara berbagai pihak, termasuk organisasi layanan sosial, fasilitator program, pejabat desa dan masyarakat penerima juga memengaruhi bagaimana bantuan sosial disalurkan dalam konteks pelaksanaan di lapangan (Nunung & Sulastri, 2025). Untuk memastikan bahwa bantuan mencapai penerima yang dituju dan memiliki dampak yang lebih besar daripada sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi, setiap pemangku kepentingan memainkan peran yang saling terkait. Akibatnya, penelitian tentang bantuan sosial harus melihat bagaimana kebijakan diimplementasikan, bagaimana prosedur verifikasi dilakukan dan bagaimana inisiatif pemberdayaan dimasukkan ke

dalam rencana untuk mengurangi ketergantungan bukan hanya memperlakukan penerima sebagai objek kebijakan (Nunung & Sulastri, 2025).

Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada penargetan penerima manfaat atau menekankan bagaimana bantuan sosial dapat mengurangi kemiskinan jangka pendek (Saragih, 2024). Namun, dari perspektif kebijakan sosial tingkat lokal masih terdapat kekurangan penelitian yang secara eksplisit menganalisis hubungan antara administrasi bantuan sosial, dinamika data penerima dan perkembangan ketergantungan penerima (Nunung & Sulastri, 2025). Pada kenyataannya, faktor-faktor yang paling penting bagi kelangsungan jangka panjang program bantuan sosial adalah ketergantungan dan keakuratan data karena hal ini bertujuan untuk menempatkan pelaksanaan kebijakan dan kondisi sosioekonomi penerima dalam kerangka analitis yang terintegrasi sehingga penelitian ini sangat relevan (Saragih, 2024).

Dalam konteks ini, tujuan penelitian ini adalah : (1) mengkaji bagaimana program bantuan sosial dilaksanakan; (2) mengidentifikasi variabel-variabel yang menyebabkan ketergantungan penerima manfaat; dan (3) menjelaskan hubungan antara mekanisme kebijakan bantuan sosial dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Selain memberikan wawasan yang berguna untuk meningkatkan tata kelola bantuan sosial sehingga berfungsi sebagai alat perlindungan sekaligus sarana untuk transformasi kesejahteraan sosial yang lebih berkelanjutan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi kemajuan studi kebijakan sosial (Salsabila, 2025).

## Metode

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif untuk memahami sepenuhnya dinamika pelaksanaan bantuan sosial dan kecenderungan ketergantungan penerima manfaat dalam kerangka kebijakan sosial (Haliim & Hakim, 2024). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara kontekstual pengalaman, sudut pandang dan interpretasi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan sosial (Siahaan et al., 2025). Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir program tetapi juga pada proses implementasi, hubungan antar aktor dan makna sosial yang muncul dalam praktik kebijakan yang sebenarnya (Sylvia et al., 2025). Melalui partisipasi aktor pelaksana yang memiliki hubungan langsung dengan proses pelaksanaan program, penelitian ini dilakukan dalam kerangka pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat lokal. Lingkungan kebijakan dan pelaksanaan bantuan sosial terkait metode distribusi, pembaruan data penerima manfaat, pendampingan sosial serta inisiatif untuk mendukung kemandirian keluarga penerima manfaat menjadi fokus lapangan (Herlambang & Wicaksono, 2025).

Informan penelitian dipilih secara cermat berdasarkan kekayaan dan relevansi informasi yang dapat mereka berikan terkait tujuan studi. Fasilitator program bantuan sosial dan Kepala Dinas Sosial Kota Batu menjadi informan utama dalam studi ini. Kedua kelompok ini dipilih karena posisi strategis dalam memahami kendala administratif, dinamika sosial penerima manfaat, proses implementasi program serta berbagai inisiatif untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan, pengawasan dan komunikasi dengan keluarga penerima manfaat (Danar Ezrananda & Imam Mukhlis, 2024).

Wawancara mendalam dan pengamatan lapangan digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Proses implementasi bantuan sosial, masalah dalam pengumpulan data penerima manfaat, persepsi terhadap perilaku penerima manfaat serta taktik yang digunakan untuk mendorong kelulusan penerima manfaat atau kemandirian, semuanya dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan arah yang jelas bagi peneliti dalam mengajukan pertanyaan sekaligus memberi kesempatan kepada narasumber untuk membahas pengalaman dan pandangan secara lebih rinci (Nunung & Sulastri, 2025). Penelitian ini menggunakan observasi lapangan selain wawancara untuk memahami konteks sosial pelaksanaan bantuan sosial. Observasi dilakukan untuk mendokumentasikan kondisi di lapangan, pola interaksi antar pihak dan gambaran umum kondisi sosioekonomi masyarakat terkait pelaksanaan program bantuan sosial. Berkat observasi ini yang melengkapi data wawancara, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan (Heryanto & Prayoga, 2023).

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui beberapa tahap. Transkripsi wawancara merupakan langkah awal yang melibatkan pengubahan informasi lisan menjadi bentuk tertulis untuk pembacaan, kategorisasi dan analisis yang sistematis. Pengurangan data sebagai langkah kedua, melibatkan pemilihan dan pemfokusan pada informasi yang relevan dengan tujuan studi. Langkah ketiga adalah kategorisasi dan pengelompokan tema yang mencakup identifikasi tren utama yang muncul dari temuan wawancara dan pengamatan. Tren-tren ini meliputi implementasi program, masalah data penerima manfaat, ketergantungan pada bantuan dan strategi pemberdayaan. Langkah terakhir adalah interpretasi data yang melibatkan penafsiran hasil lapangan dengan menghubungkannya ke kerangka teoretis dan fokus analitis studi (Dimas, 2025). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber di mana membandingkan data dari beberapa informan, terutama antara pelaksana kebijakan dan fasilitator program untuk menjamin keaslian data. Tujuan triangulasi ini adalah untuk meningkatkan validitas temuan penelitian dan menjamin konsistensi informasi. Oleh karena itu, diharapkan temuan penelitian ini akan menggambarkan kondisi implementasi bantuan sosial secara lebih akurat, menyeluruh dan sesuai dengan realitas lapangan (Marhawani et al., 2025).

## Hasil dan Diskusi

### *Implementasi Program Bantuan Sosial*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, berbeda dengan pola distribusi sebelumnya, program bantuan sosial umumnya dilaksanakan melalui proses yang lebih terstruktur dan relatif lebih akuntabel. Peran perantara dalam proses distribusi berkurang ketika bantuan disalurkan langsung kepada penerima melalui sistem perbankan atau saluran formal lainnya. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengurangi penyalahgunaan dana dan memastikan bantuan sampai langsung ke keluarga penerima (Taufik et al., 2025). Namun, pelaksanaan bantuan sosial melampaui sekadar distribusi (Noerkaisar, 2021). Temuan wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala administratif dan teknis dalam pelaksanaan program di

lapangan, terutama terkait pembaruan data, verifikasi penerima manfaat dan koordinasi antar pihak terkait (Widyaningsih et al., 2023).

Hal ini menekankan bahwa kualitas sistem yang mendukung keberlanjutan program dan ketepatan penargetan sama pentingnya dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan bantuan sosial seperti jumlah bantuan yang disalurkan. Dari sudut pandang implementasi kebijakan, kriteria ini menunjukkan bahwa bantuan sosial adalah kebijakan yang bergantung pada desain pusat dan efektivitas implementasi lokal (Argandini et al., 2025). Pelaksana program, termasuk pekerja sosial dan organisasi layanan sosial, sangat penting dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan tetap sesuai dengan kondisi sosial ekonomi penerima. Oleh karena itu, implementasi bantuan sosial bukan sekadar proses administratif yang berjalan otomatis melainkan ini adalah proses dinamis yang membutuhkan partisipasi aktif dari para pelaku implementasi.

***Permasalahan Data Penerima***

Ketepatan data penerima bantuan sosial merupakan salah satu kesimpulan paling menonjol dalam studi ini. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara data administratif yang digunakan untuk mengidentifikasi penerima bantuan dan kondisi sosioekonomi penduduk lokal. Sementara beberapa anggota masyarakat dianggap lebih membutuhkan namun belum dimasukkan ke dalam daftar penerima manfaat, beberapa rumah tangga atau individu yang secara finansial lebih baik tetap diklasifikasikan sebagai penerima bantuan. Hasil ini menunjukkan bahwa masalah bantuan sosial tidak hanya terkait distribusi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas metode pengumpulan data dan pembaruan data sosioekonomi masyarakat (Taufik et al., 2025). Karena data penerima manfaat harus melalui beberapa putaran verifikasi dan sinkronisasi antar lembaga tidak selalu mungkin untuk memperbaruinya dengan cepat.

Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara data resmi yang digunakan dalam pembuatan kebijakan dan realitas sosial di lapangan. Alhasil, ketika program bantuan sosial dilaksanakan ketidakselarasan tujuan bantuan tetap menjadi ancaman. Masalah data ini merupakan masalah struktural yang sangat memengaruhi keberhasilan program dari sudut pandang kebijakan sosial. Kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi populasi rentan berisiko tidak selaras jika data tidak cukup responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat (Hulukati et al., 2026). Akibatnya, keakuratan data harus dipandang sebagai dasar utama untuk menjamin distribusi bantuan sosial yang adil bukan sekadar masalah administratif.

***Faktor Pembentuk Ketergantungan***

Studi ini menunjukkan bahwa berbagai faktor ekonomi, sosial, budaya dan kebijakan saling berinteraksi untuk memengaruhi kecenderungan ketergantungan pada bantuan sosial. Mayoritas keluarga penerima masih memandang bantuan sosial sebagai hal yang esensial dari sudut pandang ekonomi karena membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dalam iklim ekonomi yang tidak menentu. Bantuan sosial dipandang sebagai sumber dukungan yang aman dan dapat diandalkan dalam situasi yang rapuh tersebut. Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa meskipun kondisi keuangan keluarga mulai membaik, sebagian masyarakat percaya bahwa bantuan sosial adalah “terlalu baik untuk dilepaskan." Hal ini menggambarkan keyakinan masyarakat

bahwa bantuan tidak hanya dipandang sebagai langkah pengamanan jangka pendek tetapi juga sebagai hak yang harus dipertahankan selama masih dapat diakses. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan dipengaruhi oleh budaya penerimaan bantuan yang telah muncul dalam konteks sosial komunitas selain berakar pada kebutuhan ekonomi.

Pola ketergantungan terbentuk tidak hanya oleh pertimbangan sosioekonomi tetapi juga oleh karakter rutin perencanaan kebijakan. Bantuan yang rutin dapat menyebabkan pola ekspektasi yang konsisten di kalangan penerima, terutama jika tidak diimbangi dengan insentif yang kuat untuk kemandirian. Dalam hal ini, ketergantungan terkait dengan cara kebijakan sosial dibuat dan diadopsi oleh penerima serta "kemauan" individu untuk berubah. Hasil ini mendukung gagasan bahwa diperlukan interpretasi yang lebih kritis terhadap teori ketergantungan kesejahteraan. Ketergantungan harus dipandang sebagai hasil interaksi antara struktur bantuan, situasi sosial di rumah dan persepsi kolektif masyarakat terhadap bantuan sosial itu sendiri. Hal ini tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya dengan motivasi kerja penerima yang rendah.

### *Dampak Bantuan Sosial terhadap Penerima*

Temuan studi ini secara umum menunjukkan bahwa bantuan sosial memiliki dampak yang nyata terhadap kemampuan keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pokok terutama di masa-masa ekonomi yang sulit. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak, kebutuhan pangan dan kebutuhan lain yang penting bagi kelangsungan hidup keluarga, bantuan sosial berfungsi sebagai penopang konsumsi rumah tangga. Bantuan sosial terus memainkan peran pelindung yang vital bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam konteks ini. Namun, masih terdapat batasan mengenai bagaimana bantuan sosial dapat mendorong kesejahteraan jangka panjang. Berdasarkan penelitian lapangan, bantuan sosial lebih berfungsi sebagai penopang konsumsi daripada sebagai alat yang secara langsung meningkatkan produktivitas ekonomi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bantuan sosial berguna untuk menjaga stabilitas mata pencaharian penerima manfaat dalam jangka pendek, hal itu belum tentu cukup untuk membawa perbaikan jangka panjang dalam status sosial-ekonomi penerima manfaat (Amaliah et al., 2026).

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sosial harus dievaluasi secara proporsional. Bantuan sosial tidak dapat menjadi satu-satunya alat yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Namun, peluang penerima untuk menjadi mandiri berkurang ketika bantuan terbatas pada peran konsumtif tanpa diintegrasikan ke dalam rencana untuk meningkatkan kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, agar bantuan sosial dapat melindungi sekaligus meningkatkan kondisi hidup penerimanya, fungsi transformatifnya harus diperkuat.

### *Strategi Pemerintah untuk Mengurangi Ketergantungan*

Menurut penelitian, inisiatif untuk mengurangi ketergantungan penerima bantuan sosial telah diintegrasikan melalui berbagai strategi pemberdayaan dan dukungan. Upaya menuju "graduasi," yaitu kondisi di mana penerima manfaat didorong untuk meninggalkan status penerima karena telah mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi merupakan salah satu taktik populer. Dalam hal ini, bantuan sosial dipandang

sebagai bantuan jangka pendek yang harus diikuti dengan peningkatan kemampuan penerima untuk mendukung diri sendiri. Pendekatan pemerintah juga tercermin dalam program dukungan sosial dan pendidikan keluarga yang telah diluncurkan yang bertujuan meningkatkan pemahaman penerima agar bantuan digunakan secara lebih efektif. Kebijakan bantuan sosial tidak sepenuhnya pasif seperti terlihat pada program yang mendukung kemandirian, meningkatkan pengelolaan keuangan keluarga dan mendorong penggunaan bantuan untuk kebutuhan yang lebih strategis (Aziz et al., 2025). Dalam situasi ini, pekerja sosial berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara realitas kehidupan penerima manfaat dan kebijakan resmi. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya sedang dilakukan untuk memperkuat penerima melalui bantuan usaha atau dukungan keuangan khusus bagi kelompok yang dianggap memiliki kapasitas untuk berkembang secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan bantuan hanyalah salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan, cara lain adalah memberikan kesempatan kepada penerima manfaat untuk mengembangkan mata pencaharian yang lebih stabil . Untuk menyeimbangkan aspek transformatif dan protektif dari bantuan sosial, pendekatan pemberdayaan menjadi sangat penting.

### *Analitis Teori*

Hasil studi ini menunjukkan bahwa bantuan sosial memiliki legitimasi yang signifikan sebagai alat pelindung bagi populasi rentan ketika ditinjau melalui lensa negara kesejahteraan. Stabilitas kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan bergantung pada dukungan sosial, terutama ketika akses mereka terhadap sumber daya keuangan terbatas. Dalam situasi ini, negara menjalankan peran pelindungnya dengan memberikan bantuan yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup komunitas. Namun, studi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada bantuan tidak dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa penerima manfaat kehilangan kemauan untuk bekerja ketika ditinjau dari perspektif teori ketergantungan kesejahteraan. Faktanya, temuan lapangan menunjukkan bahwa campuran antara kebutuhan ekonomi aktual, pandangan masyarakat terhadap bantuan, peluang ekonomi yang terbatas dan desain kebijakan yang berulang-ulang menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan oleh karena itu harus dilihat sebagai masalah struktural dan budaya (Ariyanto, 2026).

Sementara itu, studi kami menunjukkan bahwa kualitas implementasi di tingkat lapangan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas bantuan sosial dari sudut pandang implementasi kebijakan publik. Kebijakan yang tampak baik di atas kertas tidak selalu berjalan dengan baik dalam praktiknya, sebagaimana dibuktikan oleh masalah seperti ketidaksesuaian data, keterlambatan pembaruan informasi dan persyaratan verifikasi berlapis. Oleh karena itu, kapasitas kelembagaan, kualitas data dan kemampuan pelaksana untuk mengubah kebijakan menjadi tindakan yang selaras dengan realitas sosial masyarakat, semuanya berperan dalam efektivitas program bantuan sosial (Situmorang et al., 2025).

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial telah mengalami perbaikan melalui mekanisme distribusi yang lebih terstruktur dan penggunaan saluran formal, tetapi efektivitasnya masih menghadapi sejumlah kendala

pada tingkat implementasi. Permasalahan utama ditemukan pada akurasi dan pembaruan data penerima, proses verifikasi, serta koordinasi antaraktor pelaksana. Ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi sosial ekonomi masyarakat menyebabkan bantuan berpotensi tidak sepenuhnya tepat sasaran. Dengan demikian, kualitas data tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi menjadi faktor penting dalam menentukan keadilan dan efektivitas kebijakan bantuan sosial. Ketergantungan penerima manfaat juga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat rendahnya motivasi individu untuk bekerja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan terbentuk melalui interaksi antara kebutuhan ekonomi, keterbatasan peluang ekonomi, budaya penerimaan bantuan, persepsi terhadap bantuan sebagai hak yang perlu dipertahankan, serta pola pemberian bantuan yang berlangsung secara rutin.

Bantuan sosial tetap memiliki fungsi protektif yang penting karena membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pangan dan pendidikan, serta menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga dalam kondisi ekonomi yang rentan. Namun, apabila bantuan hanya berfungsi sebagai penopang konsumsi, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan jangka panjang menjadi terbatas. Oleh karena itu, keberlanjutan program bantuan sosial memerlukan penguatan fungsi transformatif melalui strategi pemberdayaan dan graduasi penerima manfaat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas ekonomi keluarga, pendampingan sosial, penguatan literasi dan pengelolaan keuangan, serta pemberian dukungan usaha bagi penerima yang memiliki kapasitas untuk berkembang secara mandiri. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan bantuan sosial tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan program dalam memastikan ketepatan sasaran, mengurangi ketergantungan, dan mendorong penerima manfaat menuju kemandirian ekonomi dan sosial.

## Referensi

Amaliah, N. C., Mahmudah, H., & Fajar, M. R. Al. (2026). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Peningkatan Pendapatan (Studi Kasus Di Desa O'o Kacamatan Donggo Kabupaten Bima). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *5*(3), 264–274. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2441

Argandini, D. A., Radjikan, R., & Basyar, M. R. (2025). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, *2*(3), 164–174. https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.822

Ariyanto, K. (2026). *Pembangunan Pertanian dan Inklusi Sosial: Analisis Ketimpangan dan Strategi Penghidupan Berkelanjutan di Pedesaan* (pp. 132–137).

Aziz, A., Putri, A., Ningsih, R., Yaniah, M., arif, D., Andini, D., Alfarizzi, A., Hidayah, F., Bayhaqi, F., Naramdani, Nurhayati, N., Ubaedillah, A., Sugiarto, Afriyani, L., Kartika, F., Ishtimadah, A., Khamidah, D., Aprilia, N., Khoir, M., & Sa. (2025). *Perkembangan Ekonomi Makro Islam*.

Danar Ezrananda, & Imam Mukhlis. (2024). Implementasi Dan Analisis Efektivitas Program Bantuan Sosial Digital Di Era Ekonomi Digital (Studi Kasus Di Dinas Sosial

Pemkot Batu). *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, *4*(1), 3. https://doi.org/10.17977/um066v4i12024p3

Dimas, E. (2025). Tantangan dan Strategi Penanganan Kemiskinan Struktural dalam Mewujudkan Pembangunan Sosial Inklusif. *Journal of Mandalika Social Science*, *3*(1), 64–71. https://doi.org/10.59613/jomss.v3i1.261

Fentiani, S. A., Achdiani, Y., Indah, G., Nastia, P., Studi, P., Kesejahteraan, P., & Indonesia, U. P. (n.d.). *Peran Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat*.

Haliim, W., & Hakim, A. I. (2024). Ketergantungan Masyarakat Miskin Dan Dilema Kebijakan Sosial: Studi Pada Implementasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 97–112. https://doi.org/10.33701/jkp.v7i2.4616

Herlambang, A. B., & Wicaksono, I. (2025). Evaluation of Social Assistance Policy in Improving Community Welfare in Slawu Village, Jember Regency. *Jurnal Interelasi*, *1*(4), 264–275.

Hermawati, I., Kusnali, A., Witono, T., Muhammad, A., & Saryana, S. (2024). Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. *Sosio Konsepsia*, *14*(1). https://doi.org/10.33007/ska.v14i1.3501

Heryanto, T., & Prayoga, I. A. (2023). Implementasi Kebijakan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Desa di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Remik*, *7*(2), 896–906. https://doi.org/10.33395/remik.v7i2.12198

Hulukati, I., Hamid, S. Al, & Hamim, U. (2026). The Role of the West Poowo Village Government in Enhancing Transparency and Accountability in the Family Hope Program. *JURNAL POLAHI*, *4*(1 SE-Articles), 81–91. https://jp.iregway.com/index.php/polahi/article/view/81

Marhawani, Iqbal Aidar Idrus, & Darmawati. (2025). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakatdesa Harapan Kabupaten Luwu Timur. *Journal I La Galigo : Public Administration Journal*, *9*(2), 80–90. https://doi.org/10.35914/vxy5a558

Nasripani. (2025). *Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan*. *32*(3), 167–186.

Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, *2*(1), 83–104. https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363

Nunung, A., & Sulastri, L. (2025). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial untuk Menginvestigasi. *Jurnal Administrasi Dan KebijakanPublik*, *10*(1), 62–82.

Prafianti, F., & Prananta Moeis, J. (2025). The Graduation of Program Keluarga Harapan Beneficiaries: Analysis of Driving Factors. *Research Horizon*, *5*(2), 159–170. https://doi.org/10.54518/rh.5.2.2025.498

Ruben, L. L. S. N. A. O. K. J. S. S. R. J. S. (2025). *Analisis Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial Di Kota Medan: Studi Literatur Terhadap Implementasi Kebijakan*. *2*(1), 292–300.

Salsabila, N. W. (2025). Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi: Tinjauan dari Persepsi Mahasiswa dan Masyarakat. *Karimah Tauhid*, *4*(8), 5507–5513. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i8.20134

Saragih, J. (2024). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, *5*(1), 70–80.

Siahaan, S. T., Siregar, A. C., Aryanisah, B., & Pangestoeti, W. (2025). Relevansi dan Tantangan Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Lokal di Kota Tanjungpinang. *Edu Sociata ( Jurnal Pendidikan Sosiologi )*, *8*(1), 365–370. https://doi.org/10.33627/es.v8i1.3454

Situmorang, H., Agustia, R., Sunariyanto, S., Jailani, H., Al-Ra'zie, Z., Latifa, D., Akbar Maulana, M., Elviati, E., Syarkawi, S., Nurfaisal, M., & Windra, P. (2025). *Buku Ajar Kebijakan Publik*.

Syahputra, M. Y. I., & Sukmana, O. (2024). Pengentasan Kemiskinan Melalui Graduasi Sejahtera Mandiri Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia : Tinjauan Sistematik. *Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, *3*(1), 265–279. https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i1.2153

Syahwanes, A. C., Saepudin, E. A., Madina, L. U., Azzahra, S., & Muslimah, I. (2025). Evaluasi Dampak PKH Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin. Analisis Mencakup Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, *1*(2), 176–183. https://doi.org/10.63822/j6s5v471

Syamsulhakim, E., & Khadijah, N. (2021). Graduating from a Conditional Cash Transfer Program in Indonesia. *Graduating from a Conditional Cash Transfer Program in Indonesia*. https://doi.org/10.1596/36784

Sylvia, B., Maharani, M. V., Sinaga, N. M., Darsono, W., & Oktavianti, R. (2025). Peran Dinas Sosial Kota Batam dalam Penyaluran Bantuan Sosial untuk Mendukung Ketertiban Sosial di Masyarakat. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *6*(3), 826–834. https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.766

Taufik, T., Khairunnisa, K., & Amirulkamar, S. (2025). Bantuan Sosial Menjadi Ketergantungan: Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pidie Jaya. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, *8*(2), 686–700. https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.366

Widyaningsih, D., Ruhmaniyati, & Toyamah, N. (2023). Urgensi Memutakhirkan Data Terpadu Kemiskinan Secara Berkelanjutan dan Berkualitas: Pembelajaran dari Studi Kasus di Enam Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, *31*(2 SE-Articles), 179–200. https://doi.org/10.55981/jep.2023.1013

Wuryaningsih, S. N. T. R. W. T. (2024). Politisasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, *4*(1), 124–134.

Zainab, Farida, N., Al'asqolaini, M. Z., Tofan, A., & Resdiana, E. (2023). Harapan Kemandirian Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). *Abhakte Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 88–93.

https://doi.org/10.24929/abhakte.v1i2.3060